

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 -2026.

Melalui penyusunan Renja ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng, 15 Januari 2024

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**



HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP, MM

N I P : 19870502 200701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1. Latar Belakang 1

 2. Landasan Hukum..... 2

 3. Maksud dan Tujuan 3

 4. Sistimatika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 6

 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD..... 6

 2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 14

 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 27

 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 41

 1. Telaahaan terhadap Kebijakan nasional dan Proritas Pembangunan Nasional
 terkait Tupoksi..... 41

 2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 42

 3. Program dan Kegiatan..... 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM SIDRAP 46

BAB V PENUTUP 56

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara perencanaan, pengendalian, tata cara Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran

dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dan merupakan tahun transisi karena tahun 2023 adalah akhir dari periode Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2018–2023 . Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 adalah:

- a. Undang–Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- i. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 16);
- m. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 56);
- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien.

Esensi dari sistem RENJA bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perwujudan dari Implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2024 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2022 yang diperoleh.

Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

- a. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
- b. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,

berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Berisikan tentang usul program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi–asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
- 3.2. Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KAB. SIDRAP

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat Perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan serta adanya Penambahan Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di Tahun 2022 ini menjadi lebih berbeda dari tahun sebelumnya, dampak daripada itu indikator di tahun 2019 dan 2020 tidak dipakai lagi digantikan dengan indikator yang disesuaikan dengan Permendagri 90.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini. Yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian

Analisis pencapaian Sasaran 1 : ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian***, Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Melihat pentingnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas negara di

bidang administrasi dan manajemen kepegawaian di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugasnya para pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dalam bidang kepegawaian, sehingga kualitas pelayanan pegawai juga harus diperhatikan.

Merupakan hal yang Paling Utama didalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi maka dengan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang melihat Perlunya ada Transformasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan terutama di bidang Kepegawaian Dalam hal ini yang disebutkan penerima pelayanan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lain adalah para pegawai negeri sipil itu sendiri. Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebatas kepada para PNS saja, bukan masyarakat luas. Jadi BKN adalah instansi yang mengurus semua segala sesuatu yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil tersebut, mulai dari calon pegawai negeri sipil tersebut masuk menjadi PNS, menetapkan nomor identitas pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, perpindahan PNS antar wilayah atau instansi (mutasi), serta pemberhentian dan pemberian pensiun bagi para PNS.

Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mengangkat suatu sasaran untuk memperbaiki Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian yang dianggap perlu guna menunjang efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Tugas Pelayanan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian	1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Persentase	90	99.83	110,92
Skala Capaian						110.58

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	100	100	100	99,68	99.83

Jika melihat dari capaian Kinerja dari tahun ke tahun pada keseluruhan indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan persentase yang sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	Persentase	95	99.90	105.15

Melihat dari capaian rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022 dengan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra sudah melampaui dari target diharapkan capaian ditahun 2023 tetap menunjukkan capaian yang maksimal.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian dapat dilihat dari semua jenis pelayanan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang dikerjakan selama kurun waktu satu tahun, jenis pelayanan dapat dilihat dibawah ini :

No	Jenis Layanan	Jumlah Keseluruhan Layanan	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang belum diselesaikan
1	Pelayanan Penerimaan Berkas Pendaftaran CASN	-	-	-
2	Pelayanan Berkas Usulan Pensiun	200	200	-
No	Jenis Layanan	Jumlah Keseluruhan Layanan	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang belum diselesaikan
3	Pelayanan Updating data Kepegawaian ASN	5.190	5.190	-
4	Pelayanan Pelaksanaan Mutasi ASN	461	461	-
5	Pelayanan Pindah Masuk dan Pindah Keluar Daerah	42	42	-
6	Pelayanan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat	867	841	26
7	Pelayanan Pemberkasan Seleksi JPT dan Uji Kompetensi JPT	35	35	-
8	Pelayanan Pemberkasan Usulan Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	106	106	-
9	Pelayanan Pemberkasan dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	-	-	-
10	Pelayanan Verifikasi Absensi PNS	5.001	5.001	-
11	Pelayanan Berkas Berkala PNS	2294	2294	-
12	Pelayanan Pemberkasan Pemberian Tanda Jasa (Satya Lencana)	174	174	-
13	Pelayanan Izin dan Cuti ASN	970	970	-
14	Pelayanan izin Cerai	16	16	-

15	Pelayanan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah CASN menjadi ASN	-	-	-
JUMLAH LAYANAN		15.356	15.330	26

Dari total keseluruhan layanan yaitu sebanyak 15.356 dan jumlah layanan diselesaikan sebanyak 15.330 sehingga sebanyak 26 layanan yang belum yaitu Pelayanan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat disebabkan karena tidak memenuhi syarat.

- e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya
- Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian yaitu sebesar Rp. 1.164.189.600 dan terealisasi sebesar Rp. 1.021.102.405 atau sebesar 87.71%.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian ini adalah sebanyak 1 program, 4 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dapat dilihat di tabel dibawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Asessment Center
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
		Pembinaan Disiplin ASN
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
		Evaluasi Disiplin ASN

Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari dukungan sarana dan prsarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2022	Capaian 2022
PROGRAM					
1	Program Kepegawaian Daerah	Rata-rata Nilai SKP ASN	Rata-rata Nilai Keseluruhan SKP ASN	88,40	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	Jumlah Jabatan yang terisi Seluruh OPD (/) Jumlah Total Jabatan Seluruh OPD (x) 100	62,70%	52,61%
KEGIATAN					
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengadaan ASN	Jumlah Formasi yang Terisi (/) Jumlah Keseluruhan Formasi (x) 100	98,50%	98,62
		Persentase ASN yang pensiun/berhenti	Jumlah ASN yang Pensiun (/) Jumlah Total ASN (x) 100	3,85%	3.99%
		Persentase Updating Informasi Data Kepegawaian	Jumlah Realisasi updating Data ASN (/) jumlah Total	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Formulasi Indikator	Target 2022	Capaian 2022
PROGRAM					
			Updating Data (x) 100		
2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi (/) jumlah Total ASN (x) 100	8,90%	9.21%
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Rata-rata Capaian sub kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya (/) Jumlah Total ASN (x) 100	100%	100%

2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah

Analisis pencapaian sasaran 2 : Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah sebagaimana diketahui bahwa Pengembangan Kompetensi ASN merupakan hak bagi setiap ASN, sebagaimana Tercantum dalam pasal 21 UU ASN No. 5 Tahun 2014. Terkait dengan Pengembangan Karier ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Kompetensi sebagaimana dimaksud meliputi:

- Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran, Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan

kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Perbandingan antara target dan kinerja tahun 2022 menunjukkan hasil yang memuaskan dimana ditargetkan 5,00% ASN yang direncanakan mengikuti pendidikan dan pelatihan sementara pada realisasinya sebesar 11,89% diharapkan ditahun berikutnya ditetapkan target yang lebih lagi sehingga menunjang pengembangan kompetensi ASN itu sendiri.

Pada sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah dari tahun ke tahun capaiannya fluktuatif, dan pada tahun 2022 menunjukkan penambahan yang signifikan dan melebihi target yang telah ditetapkan ini menunjukkan progres pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN itu sendiri.

Jika melihat dari Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditargetkan adalah 6,39% dan rata-rata sampai dengan tahun 2022 atau tiga tahun terakhir yaitu sebesar 7,48% maka capaiannya sudah 117,05%.

3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Analisis pencapaian sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan, pada sasaran ini indikator yang ditetapkan dalam pencapaiannya yaitu Predikat Nilai Sakip yang ditargetkan adalah 62 (B) yang memiliki kategori Baik, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 menargetkan pencapain predikat Nilai SAKIP instansi yaitu B (63).

Jika dilihat capaian Predikat Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun ke tahun menunjukkan progres yang meningkat meskipun secara poin berkurang di Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dan perubahan nomenklatur ke Permendagri 90 yang mempengaruhi capaian kinerja instansi secara keseluruhan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah mengalami peningkatan dari tahun –tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Adapun rincian penjelasan tercantum dalam Tabel dibawah ini:

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program / kegiatan Renja SKPD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023		Catatan
				Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KEPEGAWAIAN										
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Nilai SKP ASN	88,5 Poin	87,4 Poin		88,4 Poin		88,5 Poin			
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	65%	62,55%		62,70%		65%			
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN,ASN yang pensiun/berhenti dan updating Informasi kepegawaian	97%			98,5%		97%			
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	4 Dokumen	-	-	-	-	3			

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1377 Dokumen	-	-	-	3			
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	223 Dokumen	87 Dokumen	150		160			
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4 Laporan	-	-		5			
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	4 Dokumen	-	-		5			
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	233 Dokumen	183 Dokumen	331		314			
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	4 Dokumen	-	-		0			
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	3	544		2			
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10 Dokumen	-	-		5			
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000 Dokumen	1899 Dokumen	1.908		4483			
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000 Dokumen	-	-		2000			

Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Laporan	-	-	-	0			
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	100%		80%	90%				
	Persentase Pelaksanaan promosi ASN								
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	400 Dokumen	1.025	1.988	480				
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	808	3.144	3018				
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	400 Dokumen	-	-	200				
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	5%	76%	100%	100%				
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	-		5				
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6 Dokumen	8 Dokumen	4	5				
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5 Dokumen	-						
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Orang	22	30	35				
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5 Dokumen	-		10				

Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	200 Orang	-				30			
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	5 Laporan	-							
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	200 Orang	-				3			
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	5 Dokumen	-							
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	200 Orang	-				30			
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	5 Laporan	-							
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	200 Orang	-							
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	10 Orang	-				30			
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	-				300			
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	92%	80%		90%		100%			

Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15 Dokumen	-				3			
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Dokumen	3.398		5.369		5500			
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan	-				5			
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	2.365		10		10			
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	447		250		300			
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	358		1.000		1000			
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Laporan	100		30		25			
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	15		30		15			
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan	116		100		100			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%			80%		95%			
Perencanaan, Penganggaran, dan	Cakupan Penyelesaian Laporan Perencanaan SKPD	100%	100%		100%		100%			

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Cakupan Penyelesaian Laporan Penganggaran SKPD									
	Cakupan Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD									
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	-	-			10			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	-	-			10			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	-	-			10			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	-	-			10			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	-	6			6			

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	100%		92%		95%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	36 Orang/bulan		37		37			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	36		20		20			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	12 Laporan		-		10			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	-		-		20			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	95%	93%		90%		95%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	56 Laporan		100 Laporan		150 Laporan			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah yang diaadakan	100%			100%		100%			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			-					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit			-		15			

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	95%	96%		95%		95%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	489 Laporan		650		500			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12		12			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12		12			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	100%	88%		100%		100%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	14 Unit		15		15			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	12 Unit		7		7			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit		3		3			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,57%	100%		18,37%		66,22%			

Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	5%	-		4,5%		5%			
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	-							
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	-							

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	-							
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5 Dokumen	-		35 Dokumen		35 Dokumen			
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	18%			53,6%		54%			

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	5 Dokumen								
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1 Lembaga								
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	200 Orang								
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5 Laporan								
Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5 Dokumen								

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	5 Dokumen								
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	121		97 Laporan		200 Laporan			
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	5 Dokumen								

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

1. Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2022 sebanyak 332 orang.
2. Masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA kebawah, berdasarkan data terakhir per 31 Desember jumlah ASN yang berpendidikan SMA kebawah sebanyak 400 orang data ini akan mengalami penurunan setiap tahunnya karna adanya program penyesuaian ijazah yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Masih adanya pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat, data per 31 Desember 2022 jumlah ASN yang bersertifikat sebanyak 60 orang dari 332 orang, jadi jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan rasionya sebesar 18,07%, angka ini menunjukkan jumlah jabatan fungsional belum bersertifikat masih banyak dan diharapkan tahun berikutnya bisa lebih banyak.
4. Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, yang dimaksud disini adalah pendidikan SMA ke S1, S1 ke S2, mekanisme keikitsertaan pendidikan dan pelatihan formal melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar diharapkan mampu menjadi wadah bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi ASN itu sendiri. Tahun 2022 jumlah ASN yang mendapatkan Izin belajar dan Tugas Belajar sebanyak 106 orang.
5. Pelaksanaan diklat struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan ini merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan banyaknya pejabat belum mengikuti diklat struktural. Data sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu 13,04%, hal yang menyebabkan kurangnya persentase ini adalah pejabat sudah pensiun dan pengangkatan pejabat baru serta naiknya eselon pejabat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD untuk Tahun 2024 sudah mengalami perubahan dengan Rancangan Awal tahun-tahun sebelumnya, kami berharap supaya kedepan nanti tidak istilah kenapa usulan atau Program/Kegiatan tidak terakomodirdalam Pemberian Pagu Indikatif sebaiknya perlu dilakukan Kajian secara mendalam, karena menurut kami Pagu yang diberikan sangat terbatas dan hanya habis dipakai dalam biaya administrasi dan biaya operasional.Adapun hasil analisis terhadap Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO.	RANCANGAN AWAL					ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEPEGAWAIAN				7.636.801.147					7.136.801.147	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rata-rata Nilai SKP ASN	88,5	419.500.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rata-rata Nilai SKP ASN	88,5	52.500.000	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	65%				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Seluruh OPD	65%		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pengadaan ASN,ASN yang Pensiun/berhenti dan updating Informasi Kepegawaian	97%	17.500.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase pengadaan ASN	97%	17.500.000	
5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	4 Dokumen	1.500.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	4 Dokumen	1.500.000	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1377 Dokumen	1.500.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1377 Dokumen	1.500.000	

5.03.02.2.01.00 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar, Sidrap	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	223 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar, Sidrap	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	223 Dokumen	2.000.000	
5.03.02.2.01.00 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4 Laporan	-	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4 Laporan	-	
5.03.02.2.01.00 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jakarta, Makassar, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	4 Dokumen	1.500.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jakarta, Makassar, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	4 Dokumen	1.500.000	
5.03.02.2.01.00 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	233 Dokumen	2.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	233 Dokumen	2.000.000	
5.03.02.2.01.00 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	4 Dokumen	-	Evaluasi Pemberhentian ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	4 Dokumen	-	
5.03.02.2.01.00 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	1.500.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	1.500.000	
5.03.02.2.01.00 09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10 Dokumen	1.500.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10 Dokumen	1.500.000	
5.03.02.2.01.00 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000 Dokumen	4.500.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000 Dokumen	4.500.000	
5.03.02.2.01.00 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000 Dokumen	1.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000 Dokumen	1.500.000	
5.03.02.2.01.00 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Laporan	-	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Laporan	-	

5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	100%	13.500.000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	100%	13.500.000	
5.03.02.2.02.00 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	400 Dokumen	2.500.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	400 Dokumen	2.500.000	
5.03.02.2.02.00 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	10.000.000	
5.03.02.2.02.00 03	Pengelolaan Promosi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	400 Dokumen	1.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	400 Dokumen	1.000.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	5%	368.500.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	0,05	1.500.000	
5.03.02.2.03.00 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Sidrap	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	-	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Sidrap	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	-	
5.03.02.2.03.00 02	Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6 Dokumen	367.200.000	Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6 Dokumen	200.000	
5.03.02.2.03.00 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5 Dokumen	-	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5 Dokumen	-	
5.03.02.2.03.00 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Orang	1.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Orang	1.000.000	
5.03.02.2.03.00 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5 Dokumen	-	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5 Dokumen	-	
5.03.02.2.03.00 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	200 Orang	-	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	200 Orang	-	

5.03.02.2.03.00 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	5 Laporan	-	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	5 Laporan	-	
5.03.02.2.03.00 08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	200 Orang	-	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	200 Orang	-	
5.03.02.2.03.00 09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	5 Dokumen	-	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	5 Dokumen	-	
5.03.02.2.03.00 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	200 Orang	-	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	200 Orang	-	
5.03.02.2.03.00 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sidrap	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	10 Orang	-	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sidrap	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	10 Orang	-	
5.03.02.2.03.00 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Sidrap	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	300.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Sidrap	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	300.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	92 %	20.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	92 %	20.000.000	
5.03.02.2.04.00 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15 Dokumen	1.000.000	
5.03.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Dokumen	3.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Dokumen	3.000.000	
5.03.02.2.04.00 03	EvaluasiHasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan	4.500.000	EvaluasiHasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan	4.500.000	

5.03.02.2.04.00 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Sidrap	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	500.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Sidrap	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	500.000	
5.03.02.2.04.00 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	2.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	2.000.000	
5.03.02.2.04.00 07	Pembinaan Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	2.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	2.000.000	
5.03.02.2.04.00 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Laporan	6.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Laporan	6.000.000	
5.03.02.2.04.00 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	500.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	500.000	
5.03.02.2.04.00 10	Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan	500.000	Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan	500.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	6.984.301.147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Persen	6.984.301.147	
X.XX.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	6.100.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Penyelesaian Laporan Perencanaan SKPD	100 %	6.100.000	
X.XX.01.2,01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	1.000.000	
X.XX.01.2,01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	1.000.000	

X.XX.01.2,01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	1.200.000	
X.XX.01.2,01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	1.300.000	
X.XX.01.2,01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.600.000	
X.XX.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	6.775.701.147	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	6.775.701.147	
X.XX.01.2,02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	6.771.801.147	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	6.771.801.147	
X.XX.01.2,02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	1.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	1.500.000	
X.XX.01.2,02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	1.200.000	

X.XX.01.2,02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	1.200.000	
X.XX.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	95 %	10.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas	95 %	10.000.000	
x.xx.01.2,06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap, Makassar, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap, Makassar, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	10.000.000	
X.XX.01.2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang milik Daerah yang diaadakan	100 %	1.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang milik Daerah yang diaadakan	100 %	1.000.000	
X.XX.01.2,07.005	Pengadaan Mebel	Sidrap	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Mebel	Sidrap	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-	
X.XX.01.2,07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	1.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	1.000.000	
X.XX.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	95 %	113.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	95 %	113.500.000	
X.XX.01.2,08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	1.000.000	
X.XX.01.2,08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	

X.XX.01.2,08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.500.000	
X.XX.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	100 %	78.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	100 %	78.000.000	
X.XX.01.2,09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sidrap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sidrap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	75.000.000	
X.XX.01.2,09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1.000.000	
X.XX.01.2,09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				233.000.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				100.000.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,57 %	233.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,57 %	100.000.000	
5.04.02.2,01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	5 %	83.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	5 %	83.000.000	

5.04.02.2.01.00 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sidrap	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	-	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sidrap	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	-	
5.04.02.2.01.00 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SIDRAP	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	-	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SIDRAP	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	-	
5.04.02.2.01.00 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SIDRAP MAKASSAR JAKARTA	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	83.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SIDRAP MAKASSAR JAKARTA	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang	83.000.000	

5.04.02.2.01.00 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SIDRAP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5 Dokumen	-	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SIDRAP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5 Dokumen	-	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	18%	150.000.00 0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	18%	17.000.000	
5.04.02.2.02.00 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	SIDRAP	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	5 Dokumen	-	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	SIDRAP	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	5 Dokumen	-	

5.04.02.2.02.00 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	SIDRAP	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1 Lembaga	-	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	SIDRAP	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1 Lembaga	-	
5.04.02.2.02.00 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	200 Orang	-	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	200 Orang	-	
5.04.02.2.02.00 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	SIDRAP	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5 Laporan	-	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	SIDRAP	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5 Laporan	-	
5.04.02.2.02.00 05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	MAKassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5 Dokumen	-	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	MAKassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5 Dokumen	-	
5.04.02.2.02.00 06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	SIDRAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	5 Dokumen	-	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	SIDRAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	5 Dokumen	-	
5.04.02.2.02.00 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SIDRAP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SIDRAP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	17.000.000	

5.04.02.2.02.00 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SIDRAP,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	5 Dokumen	-	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SIDRAP,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	5 Dokumen	-	
-----------------------	--	---------	--	--------------	---	---	---------	--	--------------	---	--

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengevaluasi dan mencermati Program dan Kegiatan dalam Penyusun Rencana Kerja Tahun-tahun sebelumnya khususnya dalam pelaksanaan murembang SKPD kami mendapatkan usulan dari kecamatan yang khususnya menyangkut kedisiplinan pegawai.

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Tabel 4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2024

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional terkait Tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”. Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu:

- a. Pembangunan Infrastruktur;
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- c. Mendorong Investasi;
- d. Reformasi Birokrasi;
- e. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap selaku pelaksanaan kebijakan publik, yaitu “Reformasi Birokrasi” agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efesiensi lembaga.

Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kab. Sidrap, dalam hal ini BKPSDM Kab. Sidrap menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih profesional.

Tabel 3.1
Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja
BKPSDM Kab. Sidrap Tahun 2024

No.	Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024)	Rencana Kerja BKPSDM Kab. Sidrap Tahun 2024
1.	"Reformasi Birokrasi" yaitu Reformasi Struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efesiensi lembaga	Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat
		Mengoptimalkan seluruh sumber daya dan teknologi informasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan sistem perencanaan, pengembangan dan pembinaan kinerja yang jelas dan terukur
		Melakukan Reviuw Secara Internal dan Penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap dan strategi yang diletakkan untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN (BASELINE) 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN RENSTRA		
							TAHUN KE-1 (2024)	TAHUN KE-2 (2025)	TAHUN KE-3 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan	Indeks Profesionalitas ASN			83	85	84		86

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN (BASELINE) 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN RENSTRA		
							TAHUN KE-1 (2024)	TAHUN KE-2 (2025)	TAHUN KE-3 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prima dalam Pelayanan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	90	95	92	94	95
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00	6,39	6	7	8
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	63,52 (B)	64 (B)	64 (B)	65 (B)	66 B)

3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Pengelolaan Data Kepegawaian
		Evaluasi Data Informasi dan system Informasi Kepegawaian
	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
		Pengelolaan Promosi ASN
	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
		Pembinaan Disiplin ASN
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
		Evaluasi Disiplin ASN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM SIDRAP

Rencana Kerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya suatu kegiatan. Kedudukan perencanaan kinerja merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi yang akan mengarahkan instansinya kepada pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.

Rencana Kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dalam organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat pelaksana. Berikut disampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap tahun anggaran 2024 pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9
5.03	KEPEGAWAIAN				7.636.801.147	APBD			7.208.169.158
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Rata-rata SKP ASN		88,50%	419.500.000	APBD		88,60%	53.025.000
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD		65,00%		APBD		67,00%	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN,ASN yang Pensiun/berhenti dan updating Informasi Kepegawaian		97%	17.500.000	APBD		97,5%	17.675.000
5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	4 Dokumen	1.500.000	APBD		3	1.515.000
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	1377 Dokumen	1.500.000	APBD		1448	1.515.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar, Sidrap	223 Dokumen	2.000.000	APBD		239	2.020.000
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Sidrap, Makassar	4 Laporan	-			4	

5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jakarta, Makassar, Sidrap	4 Dokumen	1.500.000	APBD		3	1.515.000
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sidrap, Makassar	233 Dokumen	2.000.000	APBD		239	2.020.000
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Sidrap, Makassar	4 Dokumen	-			3	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Sidrap, Makassar	3 Lembaga	1.500.000	APBD		3	1.515.000
5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	10 Dokumen	1.500.000	APBD		10	1.515.000
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	5000 Dokumen	4.500.000	APBD		5000	4.545.000
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	5000 Dokumen	1.500.000	APBD		5000	1.515.000
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	10 Laporan	-			10	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN		100%	13.500.000	APBD		100%	13.635.000
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Makassar, Jakarta, Sidrap	400 Dokumen	2.500.000	APBD		400 Dokumen	2.525.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	800 Dokumen	10.000.000	APBD		850 Dokumen	10.100.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	400 Dokumen	1.000.000	APBD		350 Dokumen	1.010.000

5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN		5%	368.500.000	APBD		10%	1.515.000
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sidrap	200 Orang	-			300 Orang	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	6 Dokumen	367.200.000	APBD		4 Dokumen	202.000
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Sidrap	5 Dokumen	-			5 Dokumen	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Sidrap, Makassar	35 Orang	1.000.000	APBD		40 Orang	1.010.000
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Sidrap, Makassar	5 Dokumen	-			5 Dokumen	
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Sidrap, Makassar	200 Orang	-			300 Orang	
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Sidrap, Makassar	5 Laporan	-			5 Laporan	
5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	200 Orang	-			300 Orang	
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Sidrap, Makassar	5 Dokumen	-			5 Dokumen	
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	200 Orang	-			300 Orang	
5.03.02.2.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Sidrap	5 Laporan	-			5 Laporan	

5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Sidrap	5 Dokumen	-			5 Dokumen	
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Sidrap	10 Orang				10 Orang	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Sidrap	200 Orang	300.000	APBD		200 Orang	303.000
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		92 %	20.000.000	APBD		92 %	20.200.000
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	15 Dokumen	1.000.000	APBD		11 Dokumen	1.010.000
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	5200 Dokumen	3.000.000	APBD		5100 Dokumen	3.030.000
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	4 Laporan	4.500.000	APBD		4 Laporan	4.545.000
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Sidrap	50 Orang	500.000	APBD		50 Orang	505.000
5.03.02.2.04.0001	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Sidrap, Makassar	400 Orang	2.000.000	APBD		400 Orang	2.020.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Sidrap, Makassar	100 Orang	2.000.000	APBD		70 Orang	2.020.000
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sidrap	30 Laporan	6.000.000	APBD		25 Laporan	6.060.000
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Sidrap	30 Dokumen	500.000	APBD		30 Dokumen	505.000
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	4 Laporan	500.000	APBD		4 Laporan	505.000

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85%	6.984.301.147	APBD		85%	7.054.144.158
X.XX.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	6.100.000	APBD		100 %	6.100.000
X.XX.01.2,01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.000.000	APBD		10 Dokumen	1.000.000
X.XX.01.2,01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.000.000	APBD		10 Dokumen	1.000.000
X.XX.01.2,01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.200.000	APBD		10 Dokumen	1.200.000
X.XX.01.2,01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.300.000	APBD		10 Dokumen	1.300.000
X.XX.01.2,01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	6 Laporan	1.600.000	APBD		6 Laporan	1.600.000
X.XX.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	6.775.701.147	APBD		95%	6.845.544.158
X.XX.01.2,02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	38 Orang/bulan	6.771.801.147	APBD		38 38	6.841.644.158
X.XX.01.2,02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	20 Dokumen	1.500.000	APBD		20 20	1.500.000

X.XX.01.2,02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	10 Laporan	1.200.000	APBD		10 10	1.200.000
X.XX.01.2,02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sidrap	20 Laporan	1.200.000	APBD		20 20	1.200.000
X.XX.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas		95 %	10.000.000	APBD		95 %	10.000.000
X.XX.01.2,06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap, Makassar, Jakarta	100 Laporan	10.000.000	APBD		100 Laporan	10.000.000
X.XX.01.2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah yang diaadakan		100 %	1.000.000	APBD		100 %	1.000.000
X.XX.01.2,07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sidrap	5 Unit	-			5 Unit	-
X.XX.01.2,07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sidrap	8 Unit	1.000.000	APBD		5 Unit	1.000.000
X.XX.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		95 %	113.500.000	APBD		97 %	113.500.000
X.XX.01.2,08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	500 Laporan	1.000.000	APBD		500 Laporan	1.000.000
X.XX.01.2,08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	80.000.000	APBD		12 Laporan	80.000.000
X.XX.01.2,08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	32.500.000	APBD		12 Laporan	32.500.000
X.XX.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah		100 %	78.000.000	APBD		100 %	78.000.000

X.XX.01.2,09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sidrap	15 Unit	75.000.000	APBD		15 Unit	75.000.000
X.XX.01.2,09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sidrap	15 Unit	1.000.000	APBD		15 Unit	1.000.000
X.XX.01.2,09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	1 Unit	2.000.000	APBD		1 Unit	2.000.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				233.000.000	APBD			101.000.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		18,57 %	233.000.000	APBD		18,57 %	101.000.000
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional		5 %	83.000.000	APBD		5 %	83.830.000
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Sidrap	5 Dokumen	-			5 Dokumen	-
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	SIDRAP	5 Dokumen	-			5 Dokumen	-

5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	SIDRAP MAKASSAR JAKARTA	200 Orang	-	APBD		300 Orang	-
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SIDRAP	5 Dokumen	83.000.000			5 Dokumen	83.830.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural		18%	150.000.000	APBD		18%	17.170.000
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	SIDRAP	5 Dokumen	-			5 Dokumen	-
5.04.02.2.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	SIDRAP	1 Lembaga	-			1 Lembaga	-

5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Makassar, Jakarta, Sidrap	200 Orang	-			200 Orang	-
5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	SIDRAP	5 Laporan	-			5 Laporan	-
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	MAKassar, Jakarta, Sidrap	5 Dokumen	-			5 Dokumen	-
5.04.02.2.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	SIDRAP	5 Dokumen	-			5 Dokumen	-
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SIDRAP	5 Laporan	150.000.000	APBD		10 Laporan	17.170.000
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	SIDRAP,	5 Dokumen	-			5 Dokumen	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 serta Rancangan Awal Renstra BKPSDM tahun 2024-2026. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan serta sub kegiatan;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama;
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya untuk arah yang lebih baik lagi.

Peran serta maksimal dari seluruh bidang maupun sekretariat sebagai penunjang pelaksanaan bidang dalam memberikan pelayanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab bidang dan sekretariat dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang kedepannya.

Pangkajene Sidenreng, 15 Januari 2024



**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia**

HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP, MM
N I P : 19870502 200701 1 001